



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG



RENCANA KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG

2026



(0295)6999095



<https://dinhub.rembang.go.id>



Jl. Raya Lasem No. KM. 4, Kaliuntu, Pasarbanggi, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219



dinhub@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat *Allah Subhana Wa Ta'ala*, kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju. Renja memuat evaluasi hasil Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

Kami berharap dengan selesainya penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026, dapat memberikan nilai bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 30 Oktober 2024

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS	
PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN	
2026	52
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan an Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2026	54
3.2.1. Tujuan OPD.....	54
3.2.2. Indikator Tujuan OPD.....	54
3.2.3. Sasaran OPD.....	54
3.2.4. Indikator Sasaran OPD.....	55
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2026	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS	
PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026.....	72
BAB V PENUTUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Rembang	14
Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2024	21
Tabel 2. 3 Realisasi Tujuan/ Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kab. Rembang Tahun 2020-2024	28
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	29
Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026	32
Tabel 2. 6 Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Rembang	50
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029	56
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	7
Gambar 1. 2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.

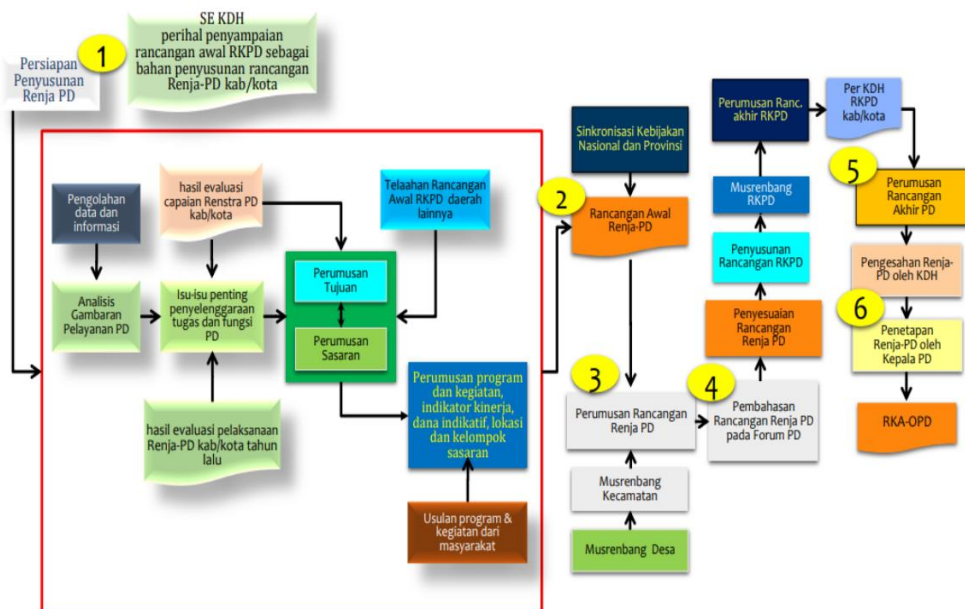
Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap Persiapan . Persiapan merupakan pra kondisi yang diciptakan dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukandalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari persiapan yang telah dilaksanakan dan merujuk pada pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perangkat daerah menyusun Renja Perangkat Daerah, Penyusunan tersebut dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang

disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Secara umum Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah serta hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Sedangkan untuk alur proses penyusunan dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

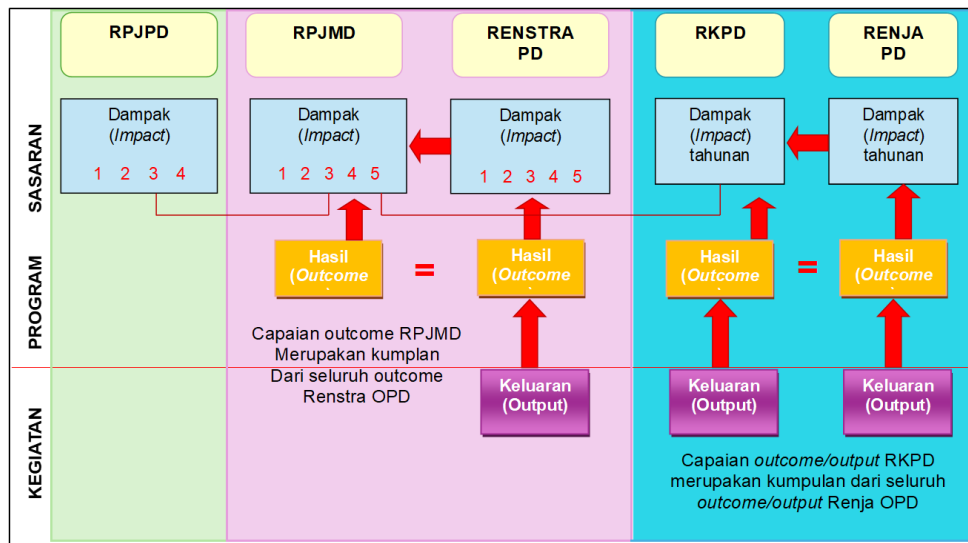


Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.2. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta bersumber dari renstra serta RKPD, sehingga arah perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang selaku salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang berkewajiban dalam penyusunan Renja Tahun 2026 dengan bersumber pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 serta evaluasi renja tahun lalu.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2026;

19. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. SE Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 000.7/5031/2025 Tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2026.

Tujuannya adalah merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2026**

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan
Kabupaten Rembang Tahun 2026
 - 3.2.1. Tujuan
 - 3.2.2. Indikator Tujuan
 - 3.2.3. Sasaran
 - 3.2.4. Indikator Sasaran
- 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN
2026**

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2024. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sasaran.

Pada tahun anggaran 2024 total anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sejumlah Rp. 21.245.100.912,- Jumlah dana tersebut digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Dari total alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan

dana yang terserap untuk membiayai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 20.716.035.137,- atau sebesar 97,51%.

Capaian kinerja selama tahun yang berlalu akan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat target dan capaian kinerja untuk urusan Bidang Perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, sebagai berikut:

Tabel 2.1 / Tabel T- C.29 (Permendagri 86 Tahun 2017) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/ d Tahun 2024

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Rembang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/ 6) * 100	9	10	11 = (10/ 4)				
DINAS PERHUBUNGAN														
2														
2	15													
	15	1												
2	15	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2 Program, 12 Indikator, 11 kegiatan, 12 indikator kegiatan	4	4	100	4 Dokumen	4	1
2	15	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	2	100	2 Dokumen	2	

2	15	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	9	12 Pekerjaan	9sub kegiatan					
2	15	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	20 paket	20				
2	15	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	5 Paket	5				
2	15	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		30	26 paket	26				
2	15	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10	4 Paket	4				
2	15	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	2 Paket	2				
2	15	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	12 Dokumen	12				
2	15	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan		60	60 paket	60				
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12 Laporan	12				
2	15	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	9	9	9 sub kegiatan	9	1			
2	15	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	3 unit	3				
2	15	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9	8 unit	8				
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	3	12	3 sub kegiatan	3	1			
2	15	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	12 Laporan	12				
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	12 Laporan	12				
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		12	12 Laporan	12				

2	15	2	02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	2514	5929	4540	4540	1,805			
2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		0	7 Unit	7				
2	15	2	02.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0	7 Orang	7				
2	15	2	02.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		5289	9823 Unit	9823				
2	15	2	02.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3.032	1 Dokumen	1				
2	15	2	02.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	2 Laporan	2				
2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		10	4 Unit	4				
2	15	2	02.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	1 Laporan	1				
2	15	2	02.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2	2 Laporan	2				
2	15	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	4	2	3	3	0,75			
2	15	02	02:06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		0	1 Laporan	1				
2	15	2	02.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan		2	140 unit	140				

Tabel 2. 2

Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			
							Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi Keuangan (%)	
1	2					4	5	6	7	8	9	10	
DINAS PERHUBUNGAN													
2													
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									21.245.100.912	20.716.035.137	97,51
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					71	69,51	97,90	18.852.178.882	18.588.296.724	98,60
			Nilai IKM OPD					85,26	93,88	110,11			
2	15	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	10.000.000	2.654.000	26,54	
2	15	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	10.000.000	2.654.000	26,54	
2	15	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1	50	-	-		
2	15	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	-	-		
2	15	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100	4.902.031.882	4.761.744.667	97,14	
2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	60	100	4.714.731.882	4.574.444.667	97,02	
2	15	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	100	187.300.000	187.300.000	100,00	
2	15	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	100	-	-		

					<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>						
2	15	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	8	8	100	181.521.000	170.623.800	94,00
2	15	1	02.06	1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	20	13	65	2.000.000	1.661.300	83,07
2	15	1	02.06	2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5	4	80	1.950.000	1.640.000	84,10
2	15	1	02.06	3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	26	22	84,615	15.070.000	14.729.600	97,74
2	15	1	02.06	4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4	2	50	17.136.400	16.960.200	98,97
2	15	1	02.06	5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2	2	100	28.328.203	26.062.000	92,00
2	15	1	02.06	6	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1	1	100	4.000.000	1.960.000	49,00
2	15	1	02.06	7	<i>Penyediaan Bahan/ Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan</i>	60	60	100	22.473.397	21.372.700	95,10
2	15	1	02.06	9	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	10	83,333	90.563.000	86.238.000	95,22
2	15	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kecukupan sarana prasarana aparatur	1	1	100	150.020.000	144.400.000	96,25
2	15	1	02.07	6	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6	6	100	150.020.000	144.400.000	96,25
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	3	3	100	13.489.876.000	13.406.798.257	99,38
2	15	1	02.08	1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	12	100	4.000.000	1.287.250	32,18
2	15	1	02.08	2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	12	100	12.600.848.000	12.551.004.580	99,60
2	15	1	02.08	4	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	12	100	885.028.000	854.506.427	96,55
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	6	3	50	118.730.000	102.076.000	85,97
2	15	1	02.09	2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau</i>	37	24	64,864	100.000.000	86.546.000	86,55

					<i>Fasilitas Penunjang</i>	<i>Fasilitas Penunjang</i>						
					<i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan pengembang'</i>	1	1	100			
2	15	2	02.03	4	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)</i>	<i>Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)</i>	2	2	100	40.000.000	39.721.550	99,30
2	15	2	02.03	5	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C</i>	<i>Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C</i>	12	12	100	22.000.000	20.961.500	95,28
2	15	2	02.04		<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	<i>Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	1	1	100	128.000.000	116.819.500	91,27
2	15	2	02.04	2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	1	1	100	128.000.000	116.819.500	91,27
2	15	2	02.05		<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah kendaraan yang diuji</i>	4540	5427	119,54	348.000.000	214.674.100	61,69
2	15	2	02.05	1	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	7	2	28,57	18000000	16640000	92,44
2	15	2	02.05	2	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	7	0	0	97000000		0,00
2	15	2	02.05	3	<i>Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	9.823	5289	53,843			
2	15	2	02.05	4	<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	5.000	3.032	60,64	100.000.000	100.000.000	100,00
2	15	2	02.05	5	<i>Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	2	0	0	-		
2	15	2	02.05	7	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	10	10	100	123.000.000	117.265.200	95,34
2	15	2	02.05	8	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	2	0	0	-		
2	15	2	02.05	10	<i>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	2	2	100	10.000.000	10.000.000	100,00
2	15	2	02.06		<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	3	3	100	831.516.480	826.918.100	99,45
2	15	2	02:06	1	<i>Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	7	0	0	-	-	

2	15	2	02.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7	0	0	-	-	
2	15	2	02.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	80	90	112,5	831.516.480	826.918.100	99,45
2	15	2	02.06	5	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	7	0	0	-	-	
2	15	2	02.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	3	4	133,33	65.000.000	30.142.000	46,372
2	15	2	02.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				-	-	
2	15	2	02.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	2	3	150	28.350.000	4.350.000	15,344
2	15	2	02.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	6	100	17.950.000	14.406.000	80,256
					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	4	6	150	18.700.000	11.386.000	60,888
2	15	2	02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2	4	200	-	-	
2	15	2	02.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	5	0	0	-	-	
2	15	2	02.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	1	100	-	-	
2	15	2	02.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	1	100	-	-	
2	15	2	02.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	100	75.000.000	70.291.600	93,72
2	15	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota,	3	3	100	75.000.000	70.291.600	93,72
2	15	2	02.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-		-	-	
2	15	2	02.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana	-	-		-	-	

					<i>Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
2	15	2	02.11	2	<i>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	-		-	-	
2	15	2	02.11	3	<i>Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	-		-	-	
2	15	2	02.14		<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	-		-	-	
2	15	2	02.14	2	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	-	-		-	-	
2	15	2	02.16		<i>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	-		-	-	
2	15	2	02.16	1	<i>Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>"Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota "</i>	-	-		-	-	
2	15	2	02.16	2	<i>Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	-		-	-	
2	15	2	02.16	3	<i>Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>"Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota "</i>	-	-		-	-	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya untuk memastikan perencanaan bidang perhubungan dapat berjalan optimal, berkesinambungan dan sinergis. Upaya tersebut diwujudkan dalam kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisis kinerja merupakan suatu perwujudan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, yang dilihat dari meningkatnya kebutuhan dasar sarana dan prasarana yang tersedia. Target renstra sampai akhir tahun 2024 dan perkiraan capaian sampai akhir tahun 2024 untuk IKK dan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Tabel 2. 3 Realisasi Tujuan/ Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kab. Rembang Tahun 2020-2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi				2024			
				2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	TUJUAN										
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Angka	64	69,50	70,63	70,15	71	69,51	97,90	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Angka	100	84,67	77,56	78,92	85,26	93,88	110,11	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Konektivitas	Angka	-	-	28,35	37,54	46,71	55,77	119,40	Sangat Tinggi
II	SASARAN										
1	Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Indeks Perkembangan Perlengkapan Jalan	%	-	-	42,85	57,14	57,14	85,71	150,00	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kenyamanan dan Kehandalan Angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	55,85	65,69	21,92	32,28	47,17	50,82	107,74	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Lalulintas yang Berkeselamatan	Indeks Peningkatan Keselamatan Lalulintas	%	70,11	-	20,35	23,65	36,30	30,80	84,85	Sedang

Berdasarkan Tabel 2.3 / Tabel T-C.30. (Permendagri 86 Tahun 2017) tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, diperoleh kesimpulan bahwa capaian indikator seperti termuat dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 Perhubungan Kabupaten Rembang secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaten Rembang

No	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Indeks Konektivitas	36,35	46,71	62,25	71,62	37,69	55,77	62,25	71,62	
1	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	42,86	57,14	85,71	100	57,14	85,71	85,71	100	
2	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	35,84	47,17	63,21	71,70	32,28	50,82	63,21	71,70	
3	Indeks Peningkatan Keselamatan Lalulintas	30,69	36,30	38,48	43,90	23,65	30,80	38,48	43,90	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam 5 (Lima) tahun kedepan faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana transportasi darat yang mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan barang.
2. Kurangnya integrasi sistem transportasi antar moda di wilayah Kabupaten Rembang.
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap angkutan umum.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib berlalu lintas.

5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perhubungan, seperti perizinan, monitoring lalu lintas, dan manajemen data transportasi.
6. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal dalam perencanaan dan pengendalian transportasi.
7. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang transportasi dan perhubungan.
8. Belum optimalnya pengelolaan parkir, terminal, dan fasilitas pendukung transportasi publik di wilayah Kabupaten Rembang.
9. Kurangnya dukungan anggaran dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.
10. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan barang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan.
11. Kurangnya inovasi layanan publik berbasis digital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.
12. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan transportasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penjabaran review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Penyesuaian Prioritas Kegiatan dan Efisiensi Anggaran
Sejumlah kegiatan Dinas Perhubungan mengalami penyesuaian pagu anggaran untuk menjaga efektivitas penggunaan dana dan mengarahkan pembiayaan pada kegiatan yang bersifat prioritas strategis dan pelayanan dasar publik.
2. Fokus pada Peningkatan Pelayanan Transportasi dan Keselamatan Lalu Lintas
RKPD 2026 menekankan pentingnya peningkatan layanan publik, termasuk transportasi. Oleh karena itu, hasil review menempatkan prioritas pada:

- Pemeliharaan dan perluasan penerangan jalan umum (LPJU) sebagai layanan dasar untuk mendukung keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Saat ini, baru sekitar 40,98% dari total 14.860 unit LPJU yang terpasang, sehingga dibutuhkan percepatan pemasangan.
 - Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai dasar perencanaan jangka menengah pengembangan transportasi daerah.
 - Kegiatan keselamatan transportasi seperti *Sosialisasi Pelajar Pelopor Keselamatan* dan *Program Mudik Gratis* tetap dipertahankan karena memberikan dampak sosial positif langsung bagi masyarakat.
3. Penguatan Aspek Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan
- Dinas Perhubungan terus diarahkan untuk memperkuat inovasi dan transformasi digital di bidang perhubungan. Pada RKPD 2026, disetujui kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Parkir Elektronik, (termasuk Pokir DPRD). Kegiatan ini meliputi:
- Pengembangan aplikasi SIM Parkir Elektronik;
 - Pelatihan pengoperasian sistem bagi petugas;
 - Pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi;
 - Pengadaan perangkat penunjang seperti *thermal printer* dan bahan pendukung lainnya.
4. Keterbatasan Anggaran terhadap Kebutuhan Sektor Transportasi
- Hasil review menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan untuk urusan perhubungan masih relatif terbatas dibandingkan dengan luasnya cakupan pelayanan dan kebutuhan infrastruktur transportasi di Kabupaten Rembang.

Tabel 2. 5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	DINAS PERHUBUNGAN				32.365.000.000					24.275.358.496	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				32.365.000.000					24.275.358.496	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rembang	Nilai SAKIP OPD IKM	73 88,3	24.795.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rembang	Nilai SAKIP OPD IKM	72 86,76	21.718.358.496	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.000000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 Dokumen	0	

			SKPD					SKPD			
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.295.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.703.358.156	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	7.562.838.156	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	285.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	140.520.000	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	12 Laporan	325.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rembang	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	12 Laporan	98.000.000	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	20 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	20 paket	1.000.000	

	Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.000.000	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rembang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 paket	10.000.000	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rembang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rembang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000	
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Rembang	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	60 paket	40.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	Rembang	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	60 paket	10.000.000	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.000.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rembang	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	1 unit	400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rembang	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	1 unit	10.000.000	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	10.000.000	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana	Rembang	Jumlah Unit	5 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana	Rembang	Jumlah Unit	5 unit	0	

	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rembang	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 laporan	15.460.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rembang	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 laporan	12.943.080.000	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.940.080.000	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rembang	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	20 unit	280.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rembang	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	20 unit	961.920.340	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	41.973.000	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10.000.000	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Rembang	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Rembang	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	909.947.340	

	Kantor dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Kantor dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rembang	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	85,71%	7.570.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rembang	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	85,71%	2.557.000.000	
		Rembang	Persentase kendaraan laik jalan	56,78%			Rembang	Persentase kendaraan laik jalan	56,78%		
		Rembang	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	100%			Rembang	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	100,00%		
		Rembang	Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola	35,00%			Rembang	Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola	35,00%		
		Rembang	Persentase Lalulintas berkeselamatan	76,60%			Rembang	Persentase Lalulintas berkeselamatan	76,60%		
		Rembang	Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana	20,00%			Rembang	Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana	20,00%		
		Rembang	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	20,00%			Rembang	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	20,00%		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	2 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ	110.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	2 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ	62.000.000	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	110.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	62.000.000	
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan	Rembang	Jumlah Dokumen	1	0	Penetapan Kebijakan	Rembang	Jumlah Dokumen	1	0	

	dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Dokumen		dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Dokumen		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	6 Macam	4.590.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	6 Macam	1.072.000.000	
			Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terpelihara	7 Macam				Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terpelihara	7 Macam		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	500 Unit	3.990.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	500 Unit	772.000.000	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit	600.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rembang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit	300.000.000	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola	3 Terminal dari 6 Terminal tipe C	490.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola	3 Terminal dari 6 Terminal tipe C	25.000.000	
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	5 Dokumen	0	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	5 Dokumen	0	
2.15.02.2.03.0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	5 Unit	0	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	5 Unit	0	

2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rembang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit	400.000.000	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rembang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	4 Unit	0	
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	12 Orang	45.000.000	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Rembang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	12 Orang	0	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rembang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	45.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rembang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	25.000.000	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 Kali	300.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 Kali	225.000.000	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	0	
2.15.2.204.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	3 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	3 Laporan	225.000.000	

	Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota			Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota			
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah kendaraan yang diuji	5536 Kendaraan	490.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah kendaraan yang diuji	5536 Kendaraan	210.000.000	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	100.000.000	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	0	
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10000 Unit	0	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10000 Unit	0	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	0	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	0	
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	20.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	0	
2.15.02.2.05.0006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	100.000.000	

2.15.02.2.05.0007	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	20.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	0	
2.15.02.2.05.0008	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	10.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2 Kali	970.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2 Kali	846.000.000	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	5 Laporan	900.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	5 Laporan	831.000.000	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	20.000.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2 Laporan	20.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2 Laporan	15.000.000	

2.15.02.2.06.0016	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rembang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Dokumen	20.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rembang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Dokumen	0	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	10.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	0	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	2 kali dari 4 kali	40.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	2 kali dari 4 kali	30.000.000	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	15.000.000	
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Rembang	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	0	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Rembang	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	0	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	20.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Rembang	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	15.000.000	
2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin		Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	2 Dokumen	0	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin		Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	2 Dokumen	0	

2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2 Kali	130.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2 Kali	10.000.000	
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	10.000.000	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	1 Laporan	0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	1 Laporan	0	
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rembang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rembang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	0	
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rembang	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rembang	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	0	
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala	Rembang	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala	Rembang	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	0	

	Kendaraan Bermotor					Kendaraan Bermotor					
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Macam dari 2 Macam	250.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Macam dari 2 Macam	77.000.000	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Laporan	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Laporan	15.000.000	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	2 Unit	150.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	2 Unit	62.000.000	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 kali	0	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 kali	0	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0	

2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 kali	0	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 kali	0
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 macam wilayah dari 2macam wilayah	0	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 macam wilayah dari 2macam wilayah	0

2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang		0	0	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang		0	0	
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang		0	0	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rembang		0	0	
2.15.0.2.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 macam dari 4 macam penerbitan izin	0	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 macam dari 4 macam penerbitan izin	0	
2.15.0.2.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Laporan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Laporan	0	
2.15.0.2.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Rembang	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan	10 Unit	0	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Rembang	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan	10 Unit	0	

	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 macam dari 4 macam penerbitan izin	0	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 macam dari 4 macam penerbitan izin	0	
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	2 Unit	0	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	2 Unit	0	
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah	1 Dokumen	0	

			operasi kewenangan Kabupaten/ Kota					operasi kewenangan Kabupaten/ Kota			
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 macam	200.000.000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 macam	0	
2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100.000.000	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0	
2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0	
2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Proses Perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang saat ini telah mengarah pada perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas mekanisme perencanaan yang diselenggarakan secara berjenjang dari bawah dimana ketiga komponen di atas terlibat secara aktif dalam perencanaan di tingkat desa atau kelurahan antar kecamatan, dalam perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten.
2. Dalam praktek penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang saat ini telah banyak mengakomodir kepentingan berbagai pihak misalnya usulan dari kelompok para pemangku kebijakan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan lokasi penempatan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
3. Renja SKPD adalah dokumen Rencana Kerja SKPD satu tahun sebagai rujukan dokumen Renstra SKPD yang disinergikan dengan hasil Musrenbang kecamatan. Hasil sinegritas usulan Musrenbang kecamatan dengan usulan SKPD dijadikan sebagai dokumen draf Renja SKPD. Untuk menghasilkan dokumen draf Renja SKPD yang informatif, dilakukan serangkaian kegiatan rapat kerja yang melibatkan faktor internal. Sebelum menjadi Draft Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang kompilasi hasil usulan musrenbang kecamatan, untuk kemudian dipilah berdasarkan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Mengkompilasi dan memilah usulan tersebut juga diperiksa terlebih dahulu apakah usulan kegiatan dari musrenbang kecamatan tumpang-tindih dengan

pembahasan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang atau tidak.

4. Renja yang telah dibuat Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang dan SKPD yang lain kemudian dibawa dalam suatu diskusi panel. Diskusi panel tersebut selain dihadiri oleh semua SKPD juga dihadiri oleh perwakilan kecamatan dan *stakeholder* lainnya. Dalam diskusi panel tersebut dipaparkan mengenai isu strategis masing-masing SKPD berdasarkan renstra SKPD serta target capaian RPJMD. Dari diskusi panel tersebut, diharapkan semua *stakeholder* dapat memahami secara komprehensif mengenai isu strategis yang dikaitkan dengan Renja SKPD serta keterkaitan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Rembang

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpelihara Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	6 macam 7 macam	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit	

2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 kali	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang yang berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting peningkatan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang professional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat untuk kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan harga terjangkau sehingga memenuhi prinsip *good governance*.

Menyikapi visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah” guna mewujudkan visi dimaksud diatas. Adapun misi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia/ SDM, dan penegakan hukum secara konsisten
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang

terjadi, ditetapkan tujuan Kementerian Perhubungan yaitu: Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera. Sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai adil dan demokratis. Adapun sasaran dari visi kementerian perhubungan yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya peningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia/ SDM transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Dalam rangka mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendekatan pembangunan wilayah dilakukan dengan cara menerapkan sistem kewilayahan dengan membagi wilayah perencanaan menjadi beberapa kawasan yang memiliki keterkaitan secara fungsional. Pembangunan ekonomi dengan mengedepankan sektor dan komoditas unggulan berbasis wilayah merupakan upaya pemantapan dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan serasi dan seimbang, baik di dalam wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan, sehingga dapat tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

dilakukan dengan dukungan infrastruktur eksisting ditambah dengan infrastruktur tambahan guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan pusat ekonomi dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya masih belum optimal dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan serta memajukan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah. Pendekatan ini diterapkan pada kawasan “Banglor” meliputi Kabupaten Rembang dan Blora serta kawasan Wanarakuti yang meliputi Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara sebagai Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas Kedungsepur.

3.2 Tujuan an Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2026

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Rembang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui tujuh misi, maka dalam rangka mendukung visi misi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang sebagai satuan kerja yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi yang telah ditetapkan, pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan OPD

1. Meningkatnya aksesibilitas pusat kegiatan dan akses transportasi

3.2.2. Indikator Tujuan OPD

1. Nilai SAKIP
2. Nilai IKM OPD
3. Indeks Manajemen Risiko
4. Indeks Konektivitas

3.2.3. Sasaran OPD

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah
2. Terjaminnya ketersediaan kelengkapan jalan
3. Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan

4. Meningkatnya Lalulintas yang berkeselamatan

3.2.4. Indikator Sasaran OPD

1. Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian saki (LKJIP PD)
2. Indeks perkembangan ketersediaan kelengkapan Jalan
3. Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Indeks Peningkatan keselamatan Lalulintas

Tabel 3. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Angka	69,51	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
		Nilai IKM OPD	Angka	93,88	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00
		Indeks Manajemen Risiko	%	-	2,625	2,705	2,785	2,836	2,953	3,04
Meningkatnya aksesibilitas pusat kegiatan dan akses transportasi		Indeks Konektivitas	%	55,77	35,53	40,60	45,60	50,78	56,04	61,39
	Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan perlengkapan Jalan	%	85,71	37,17	37,69	38,22	38,74	39,27	39,79
	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	50,82	39,53	40,84	42,49	44,32	46,37	48,64
	Meningkatnya Lalu lintas yang berkeselamatan	Indeks Peningkatan keselamatan Lalu lintas	%	30,80	28,57	42,85	57,14	71,42	85,71	100,00

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2026

URUSAN UMUM/ SEKRETARIAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA, Indikator Nilai SAKIP OPD, target 73 dan Ikm, Target 88,30

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah, target 4 dokumen

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, indikator Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun, 2 dokumen
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, indikator Jumlah dokumen anggaran yang disusun, 1 dokumen
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, indikiator Jumlah dokumen anggaran yang disusun, 4 Laporan
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, indikiator Jumlah dokumen anggaran yang disusun, 1 dokumen
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, indikiator Jumlah dokumen anggaran yang disusun, 1 dokumen
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, indikator Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 4 Laporan
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 1 dokumen

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik terkait pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, 60 orang
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Jumlah administrasi keuangan yang tersedia, 12 Dokumen
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik, 1 Laporan

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Jumlah dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik, 2 dokumen

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, 1 dokumen
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Jumlah Dokumen BMD, 1 dokumen

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Jumlah Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian, 2 sub kegiatan

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, 110 orang
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, jumlah pengadaan pakaian PDH, PDL, olahraga, 110 orang

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana, 9 sub kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, 20 jenis barang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Penyediaan Peralatan, 5 jenis barang

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 26 jenis barang
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor, 4 jenis penyediaan mamin kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, 2 jenis penyediaan (barang cetak dan penggandaan)
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 1 jenis penyediaan
7. Penyediaan Bahan/ Material, Jumlah Penyediaan Bahan/ Material, 60 jenis barang ATK
8. Fasilitas Kunjungan Tamu, Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu, 2 jenis penyediaan fasilitas tamu (akomodasi dan penginapan)
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 12 Laporan

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur, 9 sub kegiatan

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 2 jenis kendaraan (roda 2 dan roda 4)
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, 2 jenis kendaraan (roda 2 dan roda 4)
3. Pengadaan Alat Besar, Jumlah Pengadaan Alat Besar, 1 jenis kendaraan
4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, 1 jenis kendaraan
5. Pengadaan Mebel, Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan, 3 unit

6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, 8 unit
7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 1 jenis gedung kantor
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 5 jenis sarpras kantor
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 5 jenis sarpras pendukung kantor

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, 3 sub kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah laporan penyedia jasa surat menyurat yang tersedia, 12 Laporan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 12 Laporan
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, 12 Laporan

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik, 6 sub kegiatan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, 37 Kendaraan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, Jumlah Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, 37 kendaraan

3. Pemeliharaan Mebel, Jumlah Pemeliharaan Mebel, 2 jenis barang (bahan kayu dan besi ringan)
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, 10 unit
5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, 1 jenis bangunan
6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi, 2 unit

URUSAN TEKNIS / BIDANG

**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ),**

Indikator Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, (Formulasi =Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan, target $(7/7)*100\%=100\%$

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota,

Indikator Jumlah Macam Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota Yang Tersedia, target 2026 7 macam perlengkapan dan prasarana jalan (PJU, TL, WL, marka, *guardril*, halte, rambu) dan Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terpelihara, target 2026 7 macam perlengkapan dan prasarana jalan (PJU, TL, WL, marka, *guardril*, halte, rambu)

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun, unit
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia, 1540 Unit
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara, unit
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara, 748 Unit

Indikator Persentase kendaraan laik jalan. (Formulasi = jumlah KBWU yang uji / jumlah KBWU x 100 %), target 2026 $=(7566/ 9726)*100\% =77,96\%$

2. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah kendaraan yang diuji, 7566 (dari KBWU 9726)

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya, 2 Orang
3. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar, 10000 unit
4. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 1 Dokumen
5. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 2 Laporan
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 6 unit
7. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara, 2 Laporan
8. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 2 Laporan

Indikator Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan (Formulasi = $\frac{\text{macam penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan} + \text{macam Penetapan Wilayah Operasi} + \text{macam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang} + \text{macam penerbitan izin Angkutan Taksi} + \text{macam penetapan kelas tarif ekonomi untuk angkota dan angkudes}}{5} \times 100 \%$),

target 2026 $((2/ 2)+(2/ 2)+(4/ 4)+(4/ 4)+(2/ 2))/ 5$
 $=(1+1+1+1+1)/ 5=5/ 5=1*100=100\%$

3. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 1 macam dari 2 macam

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia, 2 unit
2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang, Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota, 1 Laporan

4. Kegiatan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 1 macam wilayah dari 2 macam wilayah

1. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota, Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota, 0 Dokumen
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota, Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan

Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota, 0 Dokumen

5. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 3 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning),

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota, Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota, 2 Laporan
2. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 10 Unit

6. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 3 macam dari 4 macam penerbitan izin (SPIT, trayek, kartu pengawasan KP, rekomendasi plat kuning)

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, 2 Unit

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota, Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota, 1 Dokumen

7. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 1 macam penetapan kelas tarif ekonomi (angkota dan angkudes)

1. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 1 Dokumen
2. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 1 Dokumen
3. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 1 Laporan

Indikator Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola, (Formulasi = jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C + jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir / 2 X 100 %), target 2026 = (3/ 6+1/ 5)/ 2*100%=35,00%

8. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola, 3 terminal dari 6 terminal tipe C

1. Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C, Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi, 5 Dokumen
2. Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C, Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital, 5 Unit
3. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang, Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang, 4 Unit
4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C, Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya, 12 Orang
5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara, 2 Unit

9. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, 1 tempat/ kali penerbitan izin parkir dan pembangunan fasilitas parkir (dalam 5 tahun)

1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir

Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 3 Dokumen

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota, Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota, 3 Laporan

Indikator Persentase Lalulintas berkeselamatan (Formulasi = jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ+jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas+Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)/ 3x100%, target 2026 =(4/4 + 4/5 + 4/4)/ 3*100%= (1+0,8+1)/3*100% = 93%

10. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, 2 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, 1 Dokumen
2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, 1 Dokumen

11. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, 2 kali

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota, Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota, 5 laporan

2. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, 1 Dokumen
3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota, Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, 2 Laporan
4. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, 1 Dokumen
5. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, 1 Laporan

12. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota, Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota, 2 kali dari 4 kali Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, 4 Laporan
2. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin, Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya, 4 orang
3. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin, Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi, 1 laporan
4. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin, Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan, 2 Dokumen

Indikator Persentase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana (Formulasi= jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan+jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah+jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan / 3 x 100%), target 2026 = (1/ 5+1/ 5+1/ 5)/ 3*100%=20,00%

13. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 5 kali (setahun 1 kali) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 1 Dokumen
2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 1 Dokumen

14. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, 1 kali

1. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/ Kota, Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota, 1 Dokumen
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota, Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan

untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota,
Dokumen

Indikator Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ (Formulasi = Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan / jumlah Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang direncanakan X 100%), target 2025 (2/ 10)*100%=20,00%

15. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, 2 kali

1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal, 2 Laporan
2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota, 1 Laporan
3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, 1 Laporan
4. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ, Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Orang
5. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Laporan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

Rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2026 terdiri dari 2 program, 15 kegiatan dan 49 sub kegiatan/ pekerjaan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERHUBUNGAN				24.275.358.496				31.510.000.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.275.358.496				31.510.000.000
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD IKM	Rembang	73 88,3	21.718.358.496			72 95	24.795.000.000
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	4 Dokumen	2.000.000			4 Dokumen	35.000.000
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rembang	2 Dokumen	2.000.000	PAD		2 Dokumen	10.000.000
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	5.000.000
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rembang	2 Laporan	0			4 Laporan	10.000.000
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rembang	4 Laporan	0			4 Laporan	10.000.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rembang	1 Dokumen	7.703.358.156			1 Dokumen	8.295.000.000
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rembang	60 Orang/ bulan	7.562.838.156	DAU		60 Orang/ bulan	8.000.000.000

2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rembang	12 Dokumen	140.520.000	PAD		12 Dokumen	285.000.000
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rembang	1 Laporan	0			1 Laporan	10.000.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Umum yang terlaksana	Rembang	12 Laporan	98.000.000			12 Laporan	325.000.000
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rembang	20 paket	1.000.000	PAD		20 paket	15.000.000
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rembang	5 Paket	2.000.000	PAD		5 Paket	20.000.000
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rembang	26 paket	10.000.000	PAD		26 paket	25.000.000
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rembang	6 Paket	10.000.000	PAD		6 Paket	30.000.000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rembang	2 Paket	20.000.000	PAD		2 Paket	30.000.000
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rembang	12 Dokumen	5.000.000	PAD		12 Dokumen	15.000.000
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Rembang	60 paket	10.000.000	PAD		60 paket	40.000.000
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rembang	12 Laporan	40.000.000	PAD		12 Laporan	150.000.000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketercukupan sarana prasarana aparatur	Rembang	1 unit	10.000.000			1 unit	400.000.000

2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rembang	8 unit	10.000.000	PAD		8 unit	200.000.000
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rembang	5 unit	0			5 unit	200.000.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Rembang	12 laporan	12.943.080.000			12 laporan	15.460.000.000
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rembang	12 Laporan	3.000.000	PAD		12 Laporan	10.000.000
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rembang	12 Laporan	12.940.080.000	PBJT; PAD		12 Laporan	15.000.000.000
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rembang	12 Laporan	0	PAD		12 Laporan	450.000.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik	Rembang	20 unit	961.920.340			20 unit	280.000.000
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rembang	3 Unit	41.973.000	PAD		3 Unit	150.000.000
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rembang	2 Unit	10.000.000	PAD		2 Unit	30.000.000
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Rembang	1 Unit	909.947.340	PAD		1 Unit	100.000.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	85,71%	2.557.000.000			38,22%	6.715.000.000
		Persentase kendaraan laik jalan	Rembang	56,78%				57,02%	

		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	Rembang	100%				20,60%	
		Persentase Terminal dan parkir yang terkelola	Rembang	35,00%				57,14%	
		Persentase Lalulintas berkeselamatan	Rembang	76,60%					
		Persentase jumlah manajemen rekayasa lalulintas yang terlaksana	Rembang	20,00%				57,14%	
		Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Rembang	20,00%					
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Rembang	2 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ	62.000.000			2 kali penetapan RIJ dari 4 penetapan RIJ	110.000.000
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	62.000.000			1 Dokumen	100.000.000
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	10.000.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	Rembang	6 Macam	1.072.000.000			7 Macam	3.500.000.000
		Jumlah macam Perlengkapan Jalan dan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terpelihara		7 Macam				6 Macam	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Rembang	500 Unit	772.000.000	DBH		500 Unit	3.000.000.000
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rembang	500 Unit	300.000.000	DBH		500 Unit	500.000.000

2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang terkelola	Rembang	3 Terminal dari 6 Terminal tipe C	25.000.000			3 Terminal dari 6 Terminal tipe C	290.000.000
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Rembang	5 Dokumen	0			5 Dokumen	15.000.000
2.15.02.2.03.0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Rembang	5 Unit	0			5 Unit	10.000.000
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rembang	4 Unit	0	DBH		4 Unit	100.000.000
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Rembang	3 Orang	0			3 Orang	15.000.000
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rembang	3 Unit	25.000.000	DBH		3 Unit	150.000.000
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Kali	225.000.000			1 Kali	45.000.000
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	3 Dokumen	0			3 Dokumen	30.000.000
2.15.2.204.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	3 Laporan	225.000.000	DBH		3 Laporan	15.000.000

2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	Rembang	5536 Kendaraan	210.000.000			5702 Kendaraan	535.000.000
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Rembang	1 unit	100.000.000	DBH		1 unit	200.000.000
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rembang	2 Orang	0			2 Orang	10.000.000
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Rembang	10000 Unit	0			10000 Unit	0
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	100.000.000
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	2 Laporan	0			2 Laporan	20.000.000
2.15.02.2.05.0006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Rembang	6 Unit	100.000.000	DBH		6 Unit	175.000.000
2.15.02.2.05.0007	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	2 Laporan	0			2 Laporan	20.000.000
2.15.02.2.05.0008	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	2 Laporan	10.000.000	DBH		2 Laporan	10.000.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	2 Kali	846.000.000			2 Kali	1.060.000.000
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	5 Laporan	831.000.000	DBH		5 Laporan	800.000.000

2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	50.000.000
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	2 Laporan	15.000.000			2 Laporan	100.000.000
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	100.000.000
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		2 Laporan	0			2 Laporan	10.000.000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Rembang	2 kali dari 4 kali	30.000.000			2 kali dari 4 kali	95.000.000
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rembang	4 Laporan	15.000.000	DBH		4 Laporan	15.000.000
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rembang	4 Orang	0			4 Orang	20.000.000
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Rembang	1 Laporan	15.000.000	DBH		1 Laporan	10.000.000
2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan		2 Dokumen	0			2 Dokumen	50.000.000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rembang	2 Kali	10.000.000			2 Kali	90.000.000
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rembang	2 Laporan	10.000.000	DBH		2 Laporan	10.000.000

2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Laporan	0			1 Laporan	40.000.000
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rembang	1 Laporan	0			1 Laporan	10.000.000
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Rembang	2 Orang	0			2 Orang	10.000.000
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rembang	4 Laporan	0			4 Laporan	20.000.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Macam dari 2 Macam	77.000.000			1 Macam dari 2 Macam	100.000.000
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Laporan	15.000.000			1 Laporan	50.000.000
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Rembang	2 Unit	62.000.000	DBH		2 Unit	50.000.000

2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 kali	0			1 kali	95.000.000
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	75.000.000
2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	20.000.000
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 kali	0			1 kali	100.000.000
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	75.000.000
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	25.000.000
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 macam wilayah dari 2macam wilayah	0			1 macam wilayah dari 2macam wilayah	70.000.000
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam		Rembang	0	0			0	50.000.000

	Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rembang	0	0			0	20.000.000
2.15.0.2.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 macam dari 4 macam penerbitan izin	0			1 macam dari 4 macam penerbitan izin	100.000.000
2.15.0.2.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	2 Laporan	0			2 Laporan	50.000.000
2.15.0.2.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rembang	10 Unit	0			10 Unit	50.000.000
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 macam dari 4 macam penerbitan izin	0			1 macam dari 4 macam penerbitan izin	300.000.000
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Rembang	2 Unit	0			2 Unit	200.000.000

	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.							
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	100.000.000
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 macam	0			1 macam	225.000.000
2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	75.000.000
2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Dokumen	0			1 Dokumen	100.000.000
2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rembang	1 Laporan	0			1 Laporan	50.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah dalam RPJMD tahun 2025-2029 sesuai target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2026.

Kaidah dalam penyusunan serta pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang diharuskan untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, khususnya dalam bidang perhubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang tentunya akan memerlukan penyesuaian dari aturan terdahulu.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2026 yang merupakan bahan penelaahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026, maka rencana tindak lanjut kedepan sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan menyempurnakan Renja berdasarkan Surat Edaran Bupati Rembang dan hasil dari Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Mengetahui

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009